

Pelatihan dan Pendampingan UMKM Desa Cigugurgirang, dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi

¹⁾Sumiyati*, ²⁾Ita Susanti, ³⁾Hastuti, ⁴⁾Mia Rosmiati, ⁵⁾Nafisah Ruhana

¹⁾Magister Keuangan dan Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia

²⁾Manajemen Aset, Politeknik Negeri Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia

^{3,4)}Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia

⁵⁾Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia

Email Corresponding: sumiyati@polban.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pelatihan Pendampingan UMKM Harga Pokok Produksi	<p>Desa Cigugurgirang, terletak di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, memiliki populasi sekitar 14.869 jiwa dengan mayoritas penduduknya sebagai petani. Pertumbuhan ekonominya selain dari sektor pertanian juga didukung oleh sektor UMKM. UMKM di desa ini menghadapi berbagai tantangan antara lain keterbatasan modal, kurangnya inovasi, dan penggunaan teknologi informasi yang terbatas dalam pemasaran produk, keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap penentuan harga pokok penjualan produk. Berdasarkan penelitian dan observasi, beberapa masalah yang dihadapi UMKM Desa Cigugurgirang antara lain kekurangan tenaga kerja, kurangnya inovasi produk, pengemasan yang sederhana, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, dan pemasaran yang masih mengandalkan metode tradisional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program PkM ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan pendampingan terhadap UMKM. Kegiatan tersebut antara lain fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan UMKM dalam perhitungan harga pokok produksi. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausahawan UMKM dalam menentukan harga pokok produk, membuat foto produk yang menarik, serta memasarkan produk melalui media sosial. Kegiatan PkM ini menghasilkan peningkatan kompetensi dan keterampilan wirausahawan UMKM, meningkatkan daya saing produk, serta memperluas pasar melalui pemasaran online. UMKM yang terlibat sebanyak 18 sampai 20 pelaku UMKM yang ada di Desa Cigugurgirang. Luaran dari program ini adalah buku saku penentuan harga pokok produksi, artikel ilmiah, poster, dan video kegiatan. Materi pelatihan disusun dalam bentuk modul untuk memandu peserta selama pelatihan, dan peserta yang memenuhi kualifikasi akan menerima sertifikat.</p>
	ABSTRACT

Keywords:

Training
Mentoring
MSMEs
Cost of Goods Production

Cigugur Village, located in Parongpong District, West Bandung Regency, has a population of around 14,869 people with the majority of the population being farmers. Apart from the agricultural sector, economic growth is also supported by the MSME sector. MSMEs in this village face various challenges, including limited capital, lack of innovation, and limited use of information technology in product marketing, these limitations affect the determination of the cost of goods sold for products. Based on research and observations, several problems faced by MSMEs in Cigugur Village include labor shortages, lack of product innovation, simple packaging, limited mastery of information technology, and marketing that still relies on traditional methods. To overcome this problem, the PkM program is implemented in several assistance activities for MSMEs. These activities include a focus on community empowerment through assisting MSMEs in calculating the cost of production. This assistance aims to increase the knowledge and skills of MSME entrepreneurs in determining product cost prices, creating attractive product photos, and marketing products via social media. This PkM activity results in increasing the competency and skills of MSME entrepreneurs, increasing product competitiveness, and expanding the market through online marketing. The MSMEs involved were 18 to 20 MSMEs in Cigugur Village. The output of this program is a pocket book on determining the cost of production, scientific articles, posters and activity videos. The training materials are arranged in the form of modules to guide participants during the training, and participants who meet the qualifications will receive a certificate.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan yang terkait pemberdayaan masyarakat desa maka kepala desa dan aparatnya mempunyai tugas dalam hal membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Desa Cigugur adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Jumlah penduduk Desa Cigugur sebesar 14.869 jiwa, mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Seperti desa lain yang berada di Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur merupakan desa yang sangat berkembang dan memiliki lahan yang subur sehingga cocok untuk menjadi lahan perkebunan. Petani di Desa Cigugur kebanyakan merupakan petani sayuran dan bunga potong.

Pertumbuhan perekonomian penduduk Desa Cigugur, selain mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani juga didukung oleh sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada saat ini terdapat kurang lebih 100 pengusaha UMKM yang terdapat di Desa Cigugur dengan jenis usaha mayoritas adalah bidang makanan dan minuman, kerajinan tangan dan kuliner.

UMKM di Indonesia umumnya memiliki kebutuhan yang hampir sama dalam pengembangan bisnisnya. Sementara kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (2024). Hasil penelitian Pradana, N.W. dan Sumiyana (2023), mengurutkan kebutuhan UMKM dan menganalisisnya. Urutan kebutuhan UMKM tersebut adalah aksesibiliti modal, teknologi informasi, kualitas layanan, keunggulan kompetitif, dan inovasi.

Kebutuhan lain yang harus dipersiapkan oleh UMKM adalah inovasi, daya kompetitif, dan penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan hasil penelitian Ratiyah, Hartanti, Setyaningsih ED (2021) inovasi secara signifikan dan positif mempengaruhi keunggulan kompetitif. Pengaruh teknologi informasi dan orientasi kewirausahaan pada inovasi juga berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini memiliki dua implementasi: implementasi secara teoritis yang memberikan dukungan untuk peran inovasi yang tepat dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan perannya dalam penggunaan teknologi informasi dan orientasi kewirausahaan menuju inovasi. Kemudian implementasi secara manajerial bahwa wirausahawan

UMKM harus fokus pada pengembangan nilai dan kapasitas organisasi untuk mendorong penciptaan solusi bisnis baru.

Penelitian ataupun pengabdian masyarakat terdahulu memperlihatkan kondisi yang sama dengan UMKM di Desa Cigugurgirang. Adanya keterbatasan modal, kurang memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pemasaran produk, kurangnya inovasi dalam pengembangan produk sehingga produk UMKM yang ada tidak memiliki keunggulan kompetitif dengan produk serupa dari UMKM yang berasal dari daerah lain, merupakan permasalahan yang dihadapi UMKM desa cigugurgirang. Kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat yang selama ini banyak dilaksanakan di desa cigugurgirang belum ada satupun yang memberikan pendampingan terkait pengentasan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM disana. Sementara menurut Lesmana dkk (2019), keberhasilan dari setiap program pemerintah dilihat dari kesejahteraan dan kemandirian suatu desa. Pentingnya ilmu manajemen dan bisnis dalam membentuk dan memotivasi masyarakat ekonomi lemah guna menumbuhkan enterpreneur-enterpreneur baru, sangat diperlukan saat ini (Zulfitra dkk, 2019).

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah membuat produk UMKM sehingga menciptakan lapangan kerja, salah satu faktor penting kegiatan UMKM akan berjalan lancar bila didukung dengan laporan biaya produk yang diproduksi. Menentukan harga pokok produksi diperlukan agar memiliki pengetahuan dalam mengelolah biaya (Putri & Feblidiyanti, 2021). Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak para pelaku UMKM tidak mampu menghitung harga pokok produksi secara tepat sehingga tidak mendapat informasi yang optimal atas laba rugi yang dihasilkan (Yuliyanti & Saputra, 2017).

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberhasilan dari setiap program pemerintah dilihat dari kesejahteraan dan kemandirian suatu desa (Lesmana dkk, 2019). Untuk itu ilmu manajemen dan bisnis dalam membentuk dan memotivasi masyarakat ekonomi lemah guna menumbuhkan enterpreneur-enterpreneur baru, sangat diperlukan dan penting saat ini (Zulfitra dkk, 2019). Salah satu faktor penting kegiatan UMKM akan berjalan lancar bila didukung dengan laporan biaya produk yang diproduksi. Menentukan harga pokok produksi diperlukan agar memiliki pengetahuan dalam mengelolah biaya (Putri & Feblidiyanti, 2021). Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak para pelaku UMKM tidak mampu menghitung harga pokok produksi secara tepat sehingga tidak mendapat informasi yang optimal atas laba rugi yang dihasilkan (Yuliyanti & Saputra, 2017).

Selain ilmu manajemen, peran pengetahuan akuntansi penting dalam menjalankan usaha. Besar atau kecilnya usaha semua membutuhkan perhitungan, dan salah satu perhitungan mendasar dalam berwirausaha adalah penentuan harga produk dandalam hal ini ilmu akuntansi memiliki peran penting.. Harga pokok produksi sendiri adalah biaya yang diperlukan untuk memproses suatu produk. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan, tenaga kerja dan overhead (Setiadi, 2014; Widyastuti, 2018). Biaya produksi ini sangat menentukan harga jual. Tak dipungkiri bahwa setiap usaha yang sedang berkembang memiliki permasalahan (Mory, 2022). Salah satu permasalahannya adalah menentukan Harga Pokok Produksi. Setiap usaha pasti menginginkan omset maka dari dari harga juallah pelaku usaha bisa menentukan laba yang diinginkan. Tidak hanya hal tersebut penentuan harga jual produksi juga penting dalam pengambilan keputusan.

Harga pokok produksi merupakan bagian terpenting dalam memberikan penilaian kesuksesan dari suatu usaha baik dagang maupun manufaktur (Purnawati, dkk, 2017). Harga Jual Produksi (HPP) meruapakan salah satu unsur penting untuk menunjang penjualan. Apabila sebuah usaha sudah dapat menentukan HPP maka bisa dipastikan mampu meningkatkan penjualan. Penjualan merupakan salah satu kegiatan transaksi yang dapat meningkatkan laba perusahaan (Intan, 2021).

Informasi harga pokok produksi juga bermanfaat untuk menghitung laporan laba rugi yang diperoleh sehingga dapat diketahui perkembangan usahanya (Widiamoko, dkk, 2020). Menurut Supriyono (2011:144) harga pokok produksi adalah aktiva atau jasa yang dikorbankan atau diserahkan dalam proses produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:17) menyatakan bahwa penentuan metode harga pokok produksi adalah cara perhitungan unsur- unsur biaya kedalam harga pokok produksi. Dalam perhitungan unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan yaitu *full costing* dan *variable costing*. *Full costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *over head* pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap, dengan demikian harga pokok produksi menurut *full costing* terdiri dari unsur biaya produksi Mulyadi (2015:18) menyatakan bahwa *variable costing* adalah merupakan

metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel kedalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan diharapkan dapat membantu UMKM desa cigugurgirang khususnya, untuk lebih maju dan memiliki daya saing yang tinggi. Sekaligus hal ini menjawab tantangan kebutuhan UMKM yang berada di Desa Cigugurgirang, Selain itu mendorong terlaksananya Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019), yang menetapkan program antara lain memberikan stimulus kepada UMKM di Kabupaten Bandung Barat dengan bantuan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat.

II. MASALAH



Gambar 1. Gambaran kantor dan Fasilitas Aula Desa Cigugurgirang

Gambar 1 merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan dilaksanakan, yaitu di aula Kantor Desa Cigugurgirang, Kabupaten Bandung Barat

Hasil analisis situasi melalui kegiatan wawancara yang dilakukan tim bersama Sekretaris Desa mewakili Perangkat Desa, perwakilan dari wirausahawan UMKM Desa Cigugurgirang, diperoleh data permasalahan mitra sebagai berikut:

1. UMKM di Desa Cigugurgirang pada umumnya kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja lepas harian yang ada di sekitar Desa Cigugurgirang terbilang cukup mahal, untuk tenaga kerja wanita dengan jam kerja setengah hari upah yang diterima sebesar Rp.50.000,- sementara untuk tenaga kerja laki-laki dengan jam kerja setengah hari dibayar upah sebesar Rp. 100.000,-. Dengan biaya upah yang tinggi jika kegiatan produksi tetap menggunakan tenaga kerja lepas harian akan berpengaruh terhadap harga jual dari produk UMKM. Karena beban tenaga kerja diperhitungkan dalam penentuan harga jual. Hal ini terjadi pada produk UMKM kain shibori. Permintaan terhadap kain shibori dapat dikatakan cukup tinggi, namun tidak ada tenaga kerja untuk produksi sehingga penjualan kain shibori hanya dilakukan berdasarkan pesanan saja. Bahkan banyak beberapa pesanan yang tidak terlayani.



Gambar 2 Produk UMKM kain shibori

Pada gambar 2 terdapat foto produk kain shibori yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Desa Cigugurgirang. Kain shibori Desa Cigugurgirang hanya akan diproduksi berdasarkan pesanan saja., hal ini dikarenakan keterbatasan tenaga kerja, mengingat upah tenaga kerja di Desa Cigugurgirang mulai terbilang mahal.

2. Permasalahan berikutnya adalah inovasi produk. Inovasi diperlukan untuk menjadi daya pembeda dengan produk sejenis. Misalnya pelaku UMKM produk kain shibori kesulitan menemukan kekhasan kain shibori Desa Cigugurgirang, hal ini memerlukan inovasi dan kreatifitas dari pelaku UMKM.
3. Kebutuhan UMKM Desa Cigugurgirang berikutnya adalah pengemasan produk (*packing*). Pengemasan produk UMKM Desa Cigugurgirang pada umumnya masih terlihat sederhana sehingga tidak memiliki daya kompetitif dengan produk UMKM serupa pada umumnya. Contohnya pada produk yoghurt yang dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini. Terlihat kemasan produk yoghurt yang sederhana dan ada yang tidak menggunakan merek dagang, sehingga produk terlihat kurang menarik dan kurang memiliki daya kompetitif dengan produk yoghurt lainnya yang dipasarkan.



Gambar 3 Produk UMKM yoghurt

4. Keterbatasan terhadap penguasaan teknologi informasi mengakibatkan produk UMKM kurang kompetitif dan terbatas pemasarannya hanya di wilayah setempat saja.
5. Pemasaran produk UMKM di Desa Cigugurgirang sejauh ini masih mengandalkan pemasaran secara tradisional.

Secara garis besar UMKM terkendala terhadap proses produksi, biaya tenaga kerja yang mahal, pengemasan, kebutuhan modal, inovasi, dan pemasaran produk. Terkait kendala proses produksi, contohnya pada kerajinan tangan kain shibori, proses produksi hanya dilakukan pada saat ada pesanan karena proses produksi kain shibori memerlukan teknik dan kemampuan tersendiri sehingga proses produksi memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan satu buah kain shibori yang diinginkan. Keterbatasan jumlah tenaga kerja juga membuat produksi kain shibori tidak dapat dilakukan secara massal.

Berbagai kendala dalam pengembangan UMKM di Desa Cugugurgirang di atas, maka perlu dilakukan secara bertahap pelatihan dan pendampingan, dimulai dari bagaimana menghitung biaya produksi, melakukan pengemasan atau *packaging* yang baik dan menarik, hingga memasarkan produk sehingga memiliki daya jual dan daya saing harga yang optimal. Untuk itu dalam kegiatan pengabdian masyarakat desa binaan ini diberikan pelatihan dan pendampingan yang dimulai dengan cara perhitungan harga pokok produksi.

III. METODE

Pelatihan diikuti oleh 18 orang peserta dari 20 orang pelaku UMKM Desa Cigugurgirang yang diundang pada pelatihan ini.

Pelaksanaan kegiatan PkM dengan skema Desa Binaan yang dilakukan pada pelaku UMKM Desa Cigugurgirang diselenggarakan dengan beberapa tahapan, antara lain:

- a. Survey pendahuluan;
Survey pendahuluan dilaksanakan kepada beberapa UMKM di desa Cigugurgirang, untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha UMKM disana. Selain itu dilakukan pula studi literatur yang terkait dengan penentuan harga pokok produksi yang akan menjadi dasar dalam menentukan harga jual produk, sebagaimana hasil survey pendahuluan yang menentukan kegiatan awal apakah yang diperlukan para pelaku UMKM disana. Adapun literatur yang dibutuhkan tersebut dapat bersumber dari buku, artikel jurnal, maupun dari sumber lain yang relevan.
- b. Pembuatan Buku Saku Pelatihan;
Tim PkM menyusun materi pelatihan, yang selanjutnya dijadikan buku saku
- c. Pelatihan dan pendampingan;
Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dilakukan kepada 20 pelaku usaha UMKM desa Cigugurgirang, atau sekira 20% dari seluruh UMKM yang ada di desa Cigugurgirang. Hal ini

dilaksanakan secara terbatas, mengingat waktu, tempat, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan. Jumlah 20% peserta pelaku usaha UMKM tersebut adalah kegiatan awal bagi peserta UMKM desa Cigugurgirang, yang tdiak menutup kemungkinan akan berlanjut bagi pelaku usaha UMKM yang lainnya di kesempatan berikutnya.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam 2 (dua) hari pertemuan yang perharinya dilaksanakan selama 8 jam. Setelah pelatihan selesai dilaksanakan, maka para peserta dilakukan pendampingan lebih dari 1 (satu) bulan, untuk melihat dan mengevaluasi hasil penerapan pelatihan yang diikuti.

d. Evaluasi.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada saat sebelum, selama dan setelah pelatihan berupa (pre-test dan post-test). Sementara pendampingan yang dilakukan dievaluasi melalui kunjungan lapangan, untuk melihat secara langsung bagaimana hasil penerapan pelatihan yang diikuti.

Adapun instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

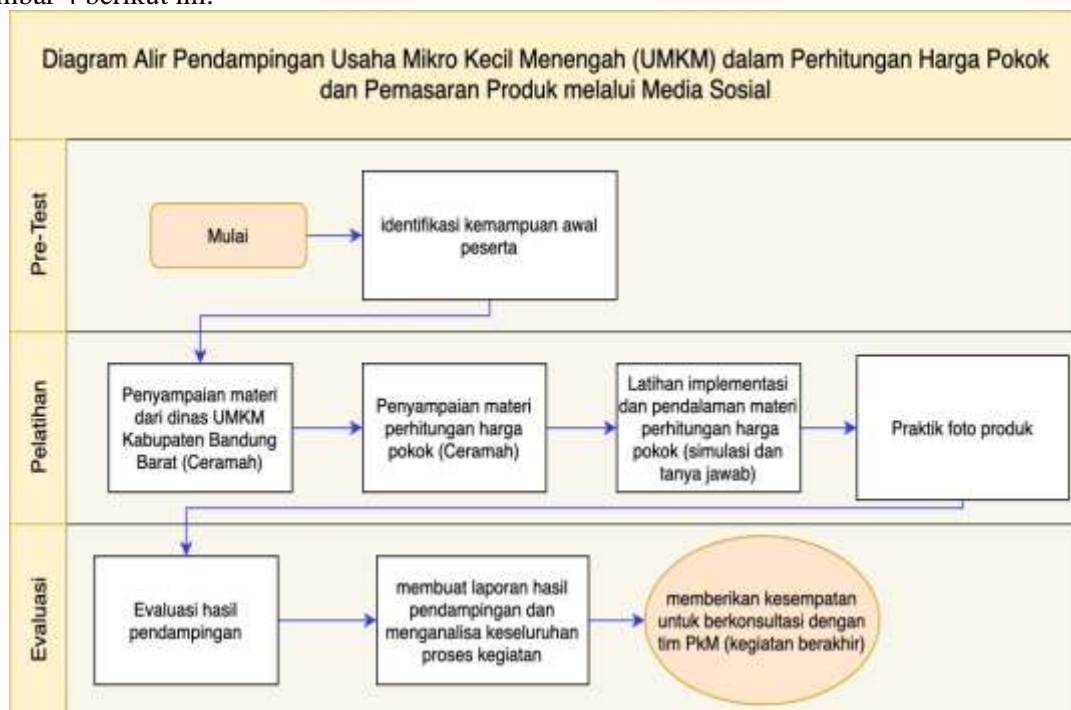
- a. Observasi;
- b. Wawancara;
- c. Pelatihan/ceramah;
- d. Evaluasi.

Untuk kegiatan PkM ini target luaran yang disiapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Target Luaran dan Indikator Capaian

No.	Jenis Luaran	Status Luaran	Indikator Capaian
1.	Pelaksanaan PkM	Wajib	Selesai
2.	Foto dan video kegiatan	Wajib	Selesai
3.	Buku Saku Perhitungan HPP	Wajib	Tersusun
4.	Review dan laporan akhir pelaksanaan	Wajib	Selesai

Secara garis besar tahapan kegiatan dan instrumen yang digunakan dalam pendampingan dapat di lihat pada gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Instrumen Kegiatan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan UMKM di Desa Cigugurgirang dalam bentuk pelatihan diikuti oleh 18 orang peserta dari 20 orang pelaku UMKM yang diundang pada pelatihan ini. Semua peserta yang hadir mengikuti

dengan antusias seluruh rangkaian kegiatan pada hari ke 1 dan ke 2. Peserta terlibat aktif dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil perhitungan yang dilakukan dalam penyusunan harga pokok produksi.

Untuk kepentingan pelatihan dan pendampingan, disusun sebuah Buku Saku Perhitungan HPP yang dimaksudkan sebagai pegangan bagi peserta selaku pelaku UMKM dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini. Di dalam Buku Saku tersebut dijelaskan bagaimana pentingnya perhitungan HPP dengan materi yang disajikan sangat relevan dengan kebutuhan UMKM dalam penentuan harga jual. Selain itu, dimuat pula materi terkait perhitungan harga pokok produksi antara lain: biaya, harga pokok, dan harga jual. Buku saku ini juga dilengkapi dengan contoh perhitungan HPP yang dapat diikuti oleh pelaku UMKM serta halaman kertas kerja yang dapat langsung digunakan oleh peserta dalam praktik perhitungan HPP. Buku saku ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis, terutama untuk kepentingan perhitungan HPP bagi peserta selaku pelaku UMKM di Desa Cigugurgirang. Berikut adalah tampilan buku saku harga pokok produksi:



Gambar 5. Buku Saku HPP

Selanjutnya disusun materi pelatihan dan pendampingan sebagai acuan bagi pemateri serta pegangan bagi peserta dalam memahami penjelasan perhitungan HPP selama kegiatan pelatihan dan pendampingan ini. Materi pelatihan dan pendampingan dibuat beriringan dengan buku saku HPP yang telah dibuat sebelumnya, sehingga materi ini saling berhubungan satu dengan lain. Materi yang disajikan terkait penjelasan perhitungan harga pokok produksi antara lain: biaya, harga pokok, dan harga jual. Materi ini dilengkapi dengan penjelasan contoh perhitungan harga pokok produksi yang dapat diikuti oleh pelaku UMKM serta penjelasan penggunaan kertas kerja yang terdapat dalam buku saku, sehingga peserta dapat langsung melakukan praktik perhitungan harga pokok produksi untuk masing-masing UMKM.



Gambar 6. Materi Pelatihan dan Pendampingan UMKM dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi

Adapun pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM Desa Cigugurgirang dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Kunjungan pra pendampingan UMKM

Sebagai salah satu bentuk pendampingan tim PkM melakukan survey UMKM di desa Cigugurgirang untuk melihat proses produksi beberapa pelaku UMKM dalam rangka mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan masing-masing UMKM sebelum melakukan perhitungan harga pokok produksi. Kunjungan dilakukan pada rumah produksi tahu, tempe dan youghurt. Kegiatan kunjungan dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini.



Gambar 7 Kunjungan pra pendampingan UMKM

2. Melaksanakan pelatihan hari pertama dan kedua

Kegiatan pendampingan berikutnya berupa pelatihan bagi pelaku UMKM Desa Cigugurgirang terkait penyusunan harga pokok produksi. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring (*offline*) bertempat di Aula Kantor Desa Cigugurgirang pada bulan Juni 2024 untuk pendampingan UMKM dalam perhitungan harga pokok produksi. Pada pelatihan ini pelaku UMKM yang diundang sebanyak 20 orang dengan berbagai jenis usaha. Pada sesi ini pelaku usaha UMKM mendapat motivasi dan pencerahan dari narasumber Dinas UMKM. Selanjutnya adalah pelatihan mengenai penyusunan harga pokok produksi, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 8 berikut ini.



Gambar 8. Suasana Pelatihan dan Pendampingan Perhitungan HPP

Pelatihan diikuti oleh 18 orang peserta dari 20 orang pelaku UMKM Desa Cigugurgirang yang diundang pada pelatihan ini. Semua peserta yang hadir mengikuti dengan antusias seluruh rangkaian kegiatan pada hari ke 1 dan ke 2. Peserta terlibat aktif dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil perhitungan yang dilakukan dalam penyusunan harga pokok produksi. Panitia juga menyediakan *door prize* peserta yang aktif dan berani untuk presentasi sehingga suasana pelatihan semakin hidup dan menarik.

Setelah pelatihan dilaksanakan, Tim PkM tetap melanjutkan dengan kegiatan pendampingan bagi peserta UMKM, sekaligus untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan hasil pelatihan. Selain itu dilakukan evaluasi kegiatan pelatihan melalui penyebaran kuisioner, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Pertanyaan Sebaran Kuesioner

NO	PERTANYAAN
X1	Kesesuaian materi dengan tujuan pelatihan
X2	Ketepatan sistematika (urutan) materi
X3	Materi yang disampaikan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
X4	Materi dapat diaplikasikan langsung dalam praktik kerja
X5	Metode pelatihan sesuai dengan materi yang disampaikan
X6	Metode pelatihan membantu pemahaman materi dan implementasinya dalam praktik kerja
X7	Metode Pelatihan mendukung peserta lebih proaktif
X8	Evaluasi kemampuan dan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan

Rentang Klasifikasi	
14 - 25,2	Tidak Baik
25,2 - 36,4	Kurang Baik
36,4 - 47,6	Cukup Baik
47,6 - 58,8	Baik
58,8 - 70	Sangat Baik



Gambar 9. Hasil Evaluasi Pelatihan

Dari hasil kuisioner evaluasi pelatihan penyusunan harga pokok produksi kepada UMKM di Desa Cigugurgirang, dapat disimpulkan, bahwa pelatihan ini penting untuk meningkatkan para pelaku UMKM dalam menetapkan harga, sehingga mampu bersaing dengan pelaku UMKM di desa lainnya. Namun demikian, kegiatan pelatihan yang baru diikuti oleh sekira 20 (dua puluh) pelaku usaha UMKM, maka perlu direncanakan kembali pelatihan ini untuk pelaku usaha UMKM di Desa Cigugurgirang yang belum mengikutinya di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Adapun suasana pendampingan yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 9 berikut ini.



Gambar 9. Kunjungan pendampingan UMKM

V. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM dalam perhitungan harga pokok produksi di Desa Cigugurgirang, Kabupaten Bandung Barat diikuti oleh sekira 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan UMKM disana. Pelatihan dan pendampingan perhitungan HPP ini diperlukan oleh sebagian besar UMKM disana, mengingat hasil analisis permasalahan UMKM disana dimulai dari kurangnya pemahaman untuk memperhitungkan biaya produksi sehingga menghasilkan harga produk yang mampu bersaing.

Berdasarkan hasil akhir pelatihan dan pendampingan perhitungan harga pokok produksi bagi UMKM di Desa Cigugurgirang diperoleh hasil, bahwa peserta semakin memahami bagaimana untuk menghitung HPP agar produk yang mereka hasilkan dapat membawa keuntungan yang memadai, serta mampu memiliki harga yang bersaing di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak Politeknik Negeri Bandung, melalui program desa binaan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM di Desa Cigugurgirang dapat terlaksana. Selain itu terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta seluruh aparatur Desa Cigugurgirang, Kabupaten Bandung Barat, yang telah memfasilitasi seluruh kegiatan ini sehingga dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Intan, A.K.A., Subiyantoro, E., Santi, F & Nanda, H.I. (2021). Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Kredit pada PT Teratai Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 3(2), 25-30. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v3i2.6594>
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).

- Mulyadi. (2015). Akuntansi Biaya. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN , Yogyakarta.
- Mory, Y. H., & Puspita, D. W. (2022). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan di Unit Perdagangan Koperasi unit Desa Pakis. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 4(1), 9-15. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i1.7471>
- Pradana NW, Sumiyana. (2023) Analisis Kebutuhan UMKM Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Penalaran Hierarki Maslow Secara Organisasional; *Accounting and Business Information Systems Journal*: 260-284.
- Purnamawati I G.A, D. (2017). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Harga Pokok Penjualan Berdasarkan Metode Akuntansi Pada Usaha Tenun. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 196–201.
- Putri, D. P. S., & Feblidiyanti, N. (2021). Perancangan Model Pembelajaran Harga Pokok Produksi Berbasis Spreadsheet untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*, 44-54.
- Ratihah, Hartanti, Setyaningsih ED.(2021). Inovasi dan Daya Kompetitif Para Wirausahawan UMKM: Dampak dari Globalisasi Teknologi Informasi. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*; 152-163.
- Setiadi, P., Saerang, D. P. E., & Runtu, T. (2014). Perhitungan Harga Pokok Produksi dalam Penentuan Harga Jual pada CV. Minahasa Mantap Perkasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 70–81.
- Supriyono, R. A. (). Akuntansi Biaya. BPFE, Yogyakarta
- Widiatmoko, J., Indarti, M. G. K., Puspitasari, E., & Hadi, S. S. (2020). Pendampingan Penyusunan Harga Pokok Produksi bagi Pelaku UMKM di Kota Semarang. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 206. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v3i2.6324>
- Yuliyanti, & Saputra, R. S. (2017). Analisis Harga Pokok Produksi Roti Berdasarkan Metode Full Costing dan Variable Costing. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 229 - 236.
- Zulfitra, Z., Susanto, S., Mubarak, A., Sutoro, M., & Anwar, S. (2019). Manajemen Bisnis Sebagai Sarana Untuk Menumbuhkan Pengusaha-Pengusaha Baru (Studi Kasus pada PKBM Nurul Qolbi, Kota Bekasi, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Februari 2024. [UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia](#) .
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (2024). Proyeksi Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 2023. Diakses tanggal 20 Februari 2024. <https://opendata.jabarprov.go.id/>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.